

BAB V

PENUTUP

1.1 Simpulan

Penelitian mengenai politik etnik pasca konflik Madura Dayak di Kabupaten Kotawaringin Barat telah mencapai beberapa kesimpulan. Berkaitan dengan pemaparan tujuan dari penelitian masyarakat pasca konflik etnik Dayak dan Madura, maka beberapa kesimpulan yang didapatkan diantaranya adalah; Masyarakat pasca konflik madura Dayak di Kab. Kotawaringin Barat memiliki integrasi yang baik satu-sama lainnya, didukung dengan kondisi sosial masyarakat terjalin baik yang mana telah terjadi pemerataan kedudukan baik dari bidang ekonomi, politik, birokrasi, sosial, budaya maupun agama. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 mengenai Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik telah terintegrasi dengan baik, terbukti dengan peningkatan kualitas hidup antar etnis yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil analisis dilapangan menjelaskan bahwa proses rekonsiliasi konflik etnik Madura Dayak terkendala pada stereotip/ sentiment yang masih melekat satu sama lainnya hingga kini. Meski demikian, sentiment tersebut tidak berpengaruh besar dalam integrasi sosial antar masyarkat pasca konflik etnik Dayak dan Madura. Hasil dari penelitian diantaranya adalah terdapat beberapa perbedaan integrasi antara pra dan pasca konflik etnik Dayak dan Madura Sampit, yang diantaranya dapat dilihat pada peta konflik sebagai berikut :

Table 5.1 Peta Konflik Pra dan Pasca Konflik Etnik Madura dan Dayak

Pra Konflik	Pasca Konflik
Masyaarakat Transmigrasi (Madura) menguasai hampir	Masyarakat Madura menjadi pasif dalam bidang politik namun terjadi

seluruh sektor ekonomi, bisnis dan politik	pemerataan lapangan kerja dengan masyarakat lainnya
Terjadi banyak konflik kekerasan berkaitan dengan etnis Madura dan Dayak	Tidak ada konflik serupa namun stereotype/sentiment masih ada
Masyarakat Madura unggul dalam berbagai bidang pekerjaan	Masyarakat Madura cenderung hanya aktif dan unggul dalam bidang ekonomi (pasar tradisional)
Masyarakat pendatang (Madura) cenderung bebas beraktifitas, baik negative maupun positif tanpa memikirkan norma dan istiadat adat masyarakat setempat	Masyarakat pendatang (Madura) telah hidup baik dengan menjunjung tinggi adat setempat dan saling menghargai satu sama lainnya
Ketimpangan penyebaran lapangan pekerjaan yang mana masyarakat Madura lebih banyak mendapatkan lapangan kerja dibandingkan masyarakat Dayak	Telah terjadi pemerataan lapangan kerja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 mengenai Penanganan Masyarakat Pasca Konflik

Sebagai salah satu daerah diluar Konflik, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 9 Tahun 2001, pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Daerah Kabupaten/Kota yang tidak terlibat langsung konflik berkewajiban memelihara dan menjaga situasi tetap kondusif, serta ayat ke 3 yang berbunyi “Untuk menciptakan keamanan dan rasa aman sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan membentuk Dewan Kehormatan Kemasyarakatan Lintas Etnik yang menjunjung tinggi akhlak mulia/harkat dan martabat kemanusiaan”, maka berbagai upaya telah dilakukan oleh

pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat agar konflik serupa tidak terulang kembali. Diantaranya adalah, pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kotawaringin Barat sebagai salah satu wadah penyaluran aspirasi serta mediasi konflik jika terjadi perselisihan baik menyangkut suku, ras, maupun agama.

1.2 Saran

Setelah melakukan observasi lapangan serta mempelajari disertas terdahulu, Peneliti mengemukakan beberapa saran. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai upaya dari pencegahan konflik, forum yang telah dibentuk oleh Badan Kespangpol Kotawaringin Barat, yaitu Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) hendaknya lebih diperjelas kembali tupoksinya serta dihimbau untuk mengadakan acara lintas etnik serta agama sebagai upaya dari perwujudan integrasi sosial serta perbaikan kondisi masyarakat pasca konflik Sampit.

Saran yang dapat diberikan oleh Peneliti kepada peneliti lainnya mengenai politik etnik terkait konflik antar etnik antara lain adalah hendaknya lebih menggali kembali mengenai politik identitas dalam isu black campaign serta over power sharing ketika masa Pemilu maupun Pilkada berlangsung di Kabupaten/Kota yang memang identik dengan isu etnisitas.